

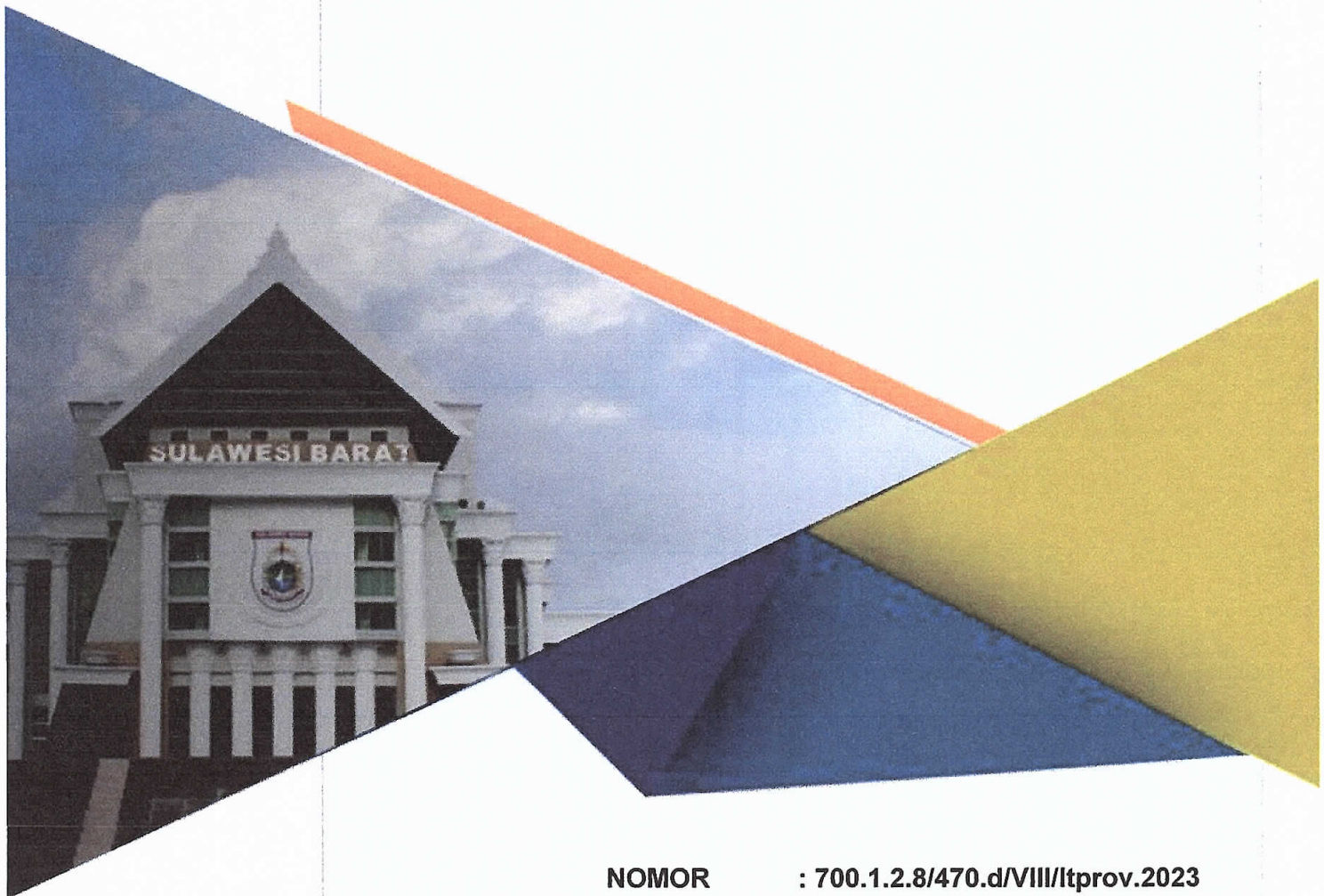


INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL SAKIP

PADA

BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023



NOMOR : 700.1.2.8/470.d/VIII/Itprov.2023
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2023



Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas - Mamuju



inspektorat_Sulbar



inspektoratprovinsisulbar@gmail.com



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

Nomor : 700.1.2.8/470.d/VIII/Itprov.2023

Mamuju, 31 Agustus 2023

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi (LHE)**

**Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.**

**Yth : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat**

Di_

Mamuju

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendaptan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100 Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat memperoleh nilai sebesar **78,85** dengan peringkat **BB** kategori **Sangat Baik**, interpretasi peringkat tersebut adalah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung, akuntabilitas yang sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / coordinator.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Perolehan
1	Perencanaan Kinerja	30	25,00
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	11,35
4	Evaluasi Internal	25	20,00
	Jumlah	100	78,85

Uraian hasil evaluasi perkomponen Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja (30%)

Nilai komponen Perencanaan Kinerja mencapai **25,00** dari bobot maksimal 30. Penilaian atas Perencanaan Kinerja meliputi Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia mencapai **6,00** (Bobot 6,00), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) mencapai **8,00** (Bobot 9,00) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan mencapai **11,00** (Bobot 15,00). Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut :

Kelemahan :

- Belum seluruhnya target yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja PK) memenuhi kriteria achievable (dapat diukur), menantang, dan realistis.
- Belum keseluruhan Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- Belum seluruhnya aktivitas pada lingkup unit kerja yang telah dilaksanakan merupakan bentuk langkah konkret atas kinerja yang ingin dicapai sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja
- Rencana aksi kinerja pada unit kerja telah berjalan namun tidak dinamis karena pemantauan capaian kinerja tidak dilakukan secara berkala.
- Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang dilakukan belum seluruhnya mengacu pada hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

- Belum seluruhnya Pegawai pada unit kerja secara tertulis menyatakan bentuk komitmen dalam mendukung capaian kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja.

b. Pengukuran Kinerja (30%)

Nilai komponen Pengukuran Kinerja mencapai **22,50** dari bobot maksimal 30. Penilaian atas Pengukuran Kinerja meliputi Pemenuhan Pengukuran Kinerja telah dilakukan mencapai **5,00** (bobot 6,00), Pengukuran kinerja telah menjadi butuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan mencapai **5,50** (Bobot 9,00) dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien mencapai **12,00** (Bobot 15,00). Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut :

Kelemahan :

- Mekanisme pengumpulan data kinerja dijelaskan namun belum dapat diandalkan dalam tahapan pengukuran kinerja tingkat OPD.
- Dilakukan pengumpulan data kinerja namun belum cukup berkaitan dan berhubungan erat dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- Dilakukan pengumpulan data kinerja namun belum cukup mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- Dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja namun belum diterapkan pada setiap level organisasi disetiap unit dibawahnya secara berjenjang.
- Belum melakukan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- Hanya sebahagian unit/satuan kerja telah memiliki pemahaman cukup dan peduli dari hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

- Hanya sebahagian pegawai pada unit kerja yang memiliki pemahaman cukup dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

c. Pelaporan Kinerja (15%)

Nilai komponen Pelaporan Kinerja mencapai **11,35** dari bobot maksimal 15,00. Penilaian atas Pelaporan Kinerja meliputi Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja mencapai **3,00** (Bobot 3,00), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya mencapai **3,10** (Bobot 4,50), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya mencapai **5,25** (Bobot 7,50). Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut:

Kelemahan :

- Kualitas penyusunan LKJIP unit kerja belum sepenuhnya sesuai standar yang ditetapkan.
- Telah tersedia informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja, namun belum sepenuhnya sesuai dengan target tahunan dan jangka menengah pada dokumen LKJIP unit kerja.
- Tidak tersedia informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada dokumen LKJIP unit kerja
- Hanya sebagian informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada dokumen LKJIP unit kerja.
- Hanya sebahagian personil pada unit kerja mempunyai kepedulian terhadap informasi yang disajikan pada LKJIP unit kerja.

- Penggunaan informasi pada LKJIP berkala belum menyesuaikan aktivitas dalam rangka pemenuhan capaian kinerja
- Belum dilakukan penggunaan informasi pada LKJIP berkala untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dalam rangka pemenuhan capaian kinerja.

d. Evaluasi Internal (25%)

Nilai komponen Evaluasi Internal mencapai **2,00** dari bobot maksimal 25,00. Penilaian atas Evaluasi Internal meliputi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan mencapai **5,00** (Bobot 5,00), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai mencapai **7,50** (Bobot 7,50) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja mencapai **7,50** (Bobot 12,50). Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut :

Kelemahan :

- Hanya sebahagian rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan pada unit kerja telah ditindaklanjuti.
- Dilakukan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi internal namun mampu secara menyeluruh meningkatkan implementasi SAKIP pada setiap unit kerja.
- Terjadi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada setiap unit kerja namun tidak seluruhnya merupakan bentuk pemanfaatan dari hasil akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan sebelumnya.
- Hasil evaluasi tidak seluruhnya dimanfaatkan dalam dukungan atas efektifitas dan efisiensi kinerja.

Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti :

Rekomendasi tahun yang lalu sebagian besar sudah ditindak Lanjuti.

Target yang ditetapkan pada capaian kinerja sepenuhnya dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya dimana hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya (2022) memperoleh nilai 77,20 Kategori Sangat Baik (BB) sedangkan tahun ini memperoleh nilai 78,85 kategori Sangat Baik (BB).

(sumber data : Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil E-SAKIP tingkat OPD Lingkup Pemprov Sulbar Tahun 2022 oleh Inspektorat Provinsi Sulbar)

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :
 - a. Agar melakukan reviu dan penyempurnaan pengukuran kinerja pada setiap level organisasi hingga unit terbawah secara berjenjang.
 - b. Agar menyusun dan menerapkan kebijakan sistem reward and punishment terkait hasil pengukuran (capaian) kinerja bagi pegawai.
 - c. Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
 - d. Membuat ketersediaan informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan penyesuaian penggunaan anggaran dalam rangka pemenuhan capaian kinerja pada dokumen LKjIP unit kerja.
 - e. Melakukan tindak lanjut secara keseluruhan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

Kami menghargai upaya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat beserta

seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

 INSPEKTUR

Drs. H. M. NATSIR, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19661231 198603 1 116

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Matamuju;
3. *Arsip*.